BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta memberikan hak yang sama kepada warga negaranya dalam hal kedudukan di depan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Sedangkan tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan untuk terciptanya ketertiban tersebut maka harus adanya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat di daerah tersebut. Pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang telah ditetapkan dikenal dengan tindak pidana sebagai mana sering disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana Indonesia di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk kejahatan ataupun pelanggaran. Pelanggaran dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila hukum sudah menentukan hal tersebut. Perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pelanggaran karena kejahatan dianggap sebagai *onrecht* (ketidakadilan).

Bentuk pelanggaran tersebut bermacam-macam seperti yang terdapat dalam KUHP pada buku ketiga yang menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran seperti pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran jabatan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Ketiga juga diatur tentang Pelanggaran ketertiban Umum, yaitu yang terdapat dalam pasal 504 dan 505, diantaranya;

1. Pasal 504 ayat (1) berbunyi, “Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam (6) minggu.”
2. Pasal 504 ayat (2) berbunyi, “Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”
3. Pasal 505 ayat (1) berbunyi, “Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”
4. Pasal 505 ayat (2) berbunyi, “Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.”

Berdasarkan peraturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, banyak anak-anak jalanan atau anak *punk* yang melanggar KUHP dengan cara mengganggu ketentraman dan ketertiban umum kota, yang salah satunya yaitu komunitas *punk*. Komunitas punk tersebut biasanya

identik dengan gaya berpakaian yang di pakai mereka sehari-hari yaitu seperti memakai tato, baju dan jaket kulit berwarna hitam serta celana jeans, gaya rambut yang dicat/diwarnai dan sepatu¹. Model baju dan celana yang lusuh identik dengan komunitas ini walaupun masih ada komunitas punk lainnya yang berpakaian yang lebih bagus.

Indonesia sebagai negara berkembang banyak sekali permasalahan sosial yang ada di dalamnya. Dengan kondisi seperti ini banyak dari kalangan anak muda Indonesia yang menggunakan atau meniru budaya punk tersebut dan diterapkan di dalam hidupnya. Pada perkembangannya punk lebih dikenal dari gaya berpakaian dan musik. Mereka menggunakan dandanan yang lusuh, kacau, dan jauh dari kesan mapan sebagai perwujudan dari bentuk protes mereka akan situasi dan kondisi yang terjadi.

Di Kota Payakumbuh persepsi tentang menjadi *punk* itu sendiri banyak disalahpahami oleh sebagian generasi muda yang mengaku sebagai *punkers*. Sebagian remaja mengartikan *punk* sebagai hidup bebas tanpa aturan dan tidak memahami estetika yang terkandung di dalamnya. Pemahaman yang salah dan setengah-setengah itu mengakibatkan banyak dari mereka melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dan ketentraman kota.

Kasatpol PP Kota Payakumbuh Fauzi Firdaus mengatakan bahwa puluhan anak *punk* di kota Payakumbuh masih saja membuat masalah sosial. Kehadiran mereka meresahkan pedagang di pusat pertokoan bertingkat dan di pasar tradisional Pasar Buah dengan bau mereka yang menyengat orang terdekat

¹<https://firmsahappe.wordpress.com/2012/12/10/komunitas-punk-psikologi-sosial-3/>, diakses pada tanggal 2 September 2016, Pukul 11.00 Wib.

dengannya dan mengaku tak mampu berbuat banyak untuk menuntaskan persoalan anak *punk* ini.

Mereka sudah beberapa kali menertibkan anak *punk* ini, tapi setelah diberi pembinaan dan mereka dilepas kembali, tak lama kemudian anak *punk* kembali membuat gaduh di pusat perniagaan Payakumbuh, anak *punk* itu beraktifitas mengamen mencari uang. Hanya saja karena penampilannya yang urakan dan berbau membuat pedagang dan tamu yang berkunjung ke pasar tak simpatik. Saat ditangkap, mereka ada yang dimandikan dan setelah itu mereka kembali berpakaian urakan karena mereka lebih senang dengan gaya yang urakan tersebut.

Penanganan anak *punk* ini perlu dikoordinasikan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tidak hanya dilakukan oleh Pemko sendiri tapi juga perlu kebijakan yang tegas dari seluruh daerah dan pihak provinsi. Masalahnya, anak *punk* ini suka berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya di Sumbar dan provinsi lainnya.

Walau begitu langkah penertiban terhadap anak *punk* itu akan terus dilakukannya terhadap para *punkers* yang mengganggu ketertiban umum di pusat perniagaan Payakumbuh akan ditindak sesuai prosedural yang berlaku.² Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, Tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum, Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, Tertib terhadap Pedagang Kaki Lima (K5), dan Kewajiban Membawa Bukti/ Identitas Diri Gelandangan dan Pengemis. Untuk

²Hasil Pra Penelitian, wawancara dengan Kasatpol PP kota Payakumbuh.

yang bertugas dan mempunyai wewenang dalam melakukan penertiban tersebut yaitu diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.³ Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Selain itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, maka Satpol PP melaksanakan tugasnya dengan cara melakukan razia secara teratur di Kota Payakumbuh.

Dengan semakin banyaknya jumlah anak *punk* yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum di Kota Payakumbuh, maka sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2016 Satpol PP telah menangkap sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang yang telah melakukan pelanggaran,⁴ dengan pelanggaran yang sama yaitu tidak membawa bukti/identitas diri mereka.

Satpol PP menangkap dan membawa mereka untuk diamankan dan beberapa dari *punkers* yang tertangkap oleh Satpol PP ada yang dipulangkan kembali kerumah orang tua dan ada pula yang diserahkan ke dinas sosial untuk diberikan pengarahan. Lalu bagi *punkers* yang sudah lebih dari 3 kali

³Penjelasan dari Peraturan Daerah RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁴ Hasil Pra Penelitian, Data dari Satpol PP kota Payakumbuh.

ditangkap oleh Satpol PP tetapi masih melakukan pelanggaran yang sama maka Satpol PP berhak menyerahkan mereka kembali pada dinas sosial untuk diberikan pembinaan lanjutan. Pembinaan lanjutan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada *punkers* supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pelanggaran yang umumnya terjadi yaitu terhadap Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Kesejahteraan Umum. Pasal yang sering dilanggar yaitu Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 yaitu tentang Kewajiban Membawa Bukti/Identitas Diri Gelandangan dan Pengemis, diantaranya :

1. Pasal 9 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang diwajibkan membawa bukti/identitas diri yang sah apabila berkunjung/ berada ditempat/fasilitas umum.”
2. Pasal 9 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti/identitas diri lain yang sah apabila diminta oleh petugas/pejabat yang berwenang selaku dilakukan razia, pemeriksaan dan atau penyidikan.”
3. Pasal 9 ayat (3) berbunyi, “Setiap orang dilarang menggelandang di kantor-kantor pemerintahan, jenjang-jenjang, jalan-jalan, taman, jalur hijau atau fasilitas umumnya.”
4. Pasal 9 ayat (4) berbunyi, “setiap orang atau badan, wali atau orang lain yang disertai oleh hakim dilarang mengobjekkan/memperalat anak-anak dibawah umum untuk mengemis dan atau untuk memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.”

Salah satu contoh yang dapat kita lihat yakni pada tanggal 3 Februari 2016 dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP menjaring belasan anak punk dari berbagai lokasi daerah di Payakumbuh karena telah mengganggu ketertiban umum. Dari penangkapan tersebut, tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh anak *punk* kemudian mereka dibawa ke Kantor Satpol PP Payakumbuh. Setelah beberapa kali dilakukan razia oleh Satpol PP sering ditemukan hal-hal yang tidak pantas, diantaranya kondom yang mereka gunakan untuk melakukan perbuatan asusila disalah satu toko yang ada di Kota Payakumbuh⁵ selain itu mereka juga sering minum-minuman keras dan minum bir.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengambil judul: **“UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PUNK DI KOTA PAYAKUMBUH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penanggulangan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh anak *punk* di Kota Payakumbuh ?

⁵<http://sumbar.antarane.ws.com/berita/169533/satpol-pp-payakumbuh-jaring-belasan-anak-punk.html>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2015, pada pukul 11.00 Wib.

2. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanggulangan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh anak *punk* di Kota Payakumbuh ?
3. Apa saja kendala dan upaya dalam penanggulangan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh anak *punk* di Kota Payakumbuh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penanggulangan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh anak *punk* di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui koordinasi Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menanggulangi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh anak *punk* di Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penanggulangan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh anak *punk* di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap semoga hasil penelitian dan penulisan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum pidana tentang tindak pidana anak.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- c. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perkembangan hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam mewujudkan hukum yang dicita-citakan.
- b. Bagi pemerintah setempat supaya dapat mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh khususnya peraturan tentang penertiban terhadap anak punk.
- c. Bagi masyarakat pemangku adat setempat supaya dapat lebih memperhatikan kaum dan anggota keluarga khususnya terhadap anak-anak dan kamanakan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

A. Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang pada hakikatnya berupa penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur

penilaian pribadi.⁶ Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum menggunakan tindakan *preventif* dan tindakan *represif*.

Penegakan hukum preventif adalah tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sedangkan tindakan represif adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁷

1. Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-undang.

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan Peraturan Perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela, petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor Masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam

⁶Soerjono Soekanto, (1990), *polisi dan lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, hlm 6.

⁷Soerjono Soekanto, (2011), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

4. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

5. Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁸

B. Tujuan Pidana

Adapun teori –teori tentang tujuan pidana adalah:

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Penjatuhan hukum didasarkan pada pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang.

⁸*ibid.*, hlm 9

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, sehingga pidana itu secara mutlak ada karena dilakukannya kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu, tindak pidana itu telah menimbulkan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.⁹

2. Teori Relatif atau tujuan

Teori ini berdasarkan pendirian dan asas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan sehingga pemidanaan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan pembalasan.

Tujuan tersebut antara lain:

a. Untuk Menakuti

Hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa sehingga orang takut melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini adalah hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang siksaan.

b. Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terpidana sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan-peraturan hukum lagi.

c. Untuk Melindungi

Tujuan hukuman adalah melindungi masyarakat terhadap perbuatan jahat. Dengan dipidananya si penjahat sementara waktu, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu.¹⁰

Dalam ilmu hukum pidana teori relatif ini terbagi atas dua yaitu:

a. Prevensi Umum (*general preventie*)

⁹Andi Hamzah, (1994), *Asas-asas Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.22.

¹⁰Djisman Samosir, (2002), *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Putra Arbadin, Bandung, hlm.12.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat dengan memidana pelaku penjahat. Jadi dalam hal ini pembedaan bermaksud untuk menakut-nakuti anggota masyarakat agar tidak melakukan kejahatan,

b. *Prevensi Khusus (Spesiale Preventie)*

Preventie khusus lebih menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3. Teori Gabungan

Merupakan gabungan antara teori pembalasan dengan tujuan. Menurut teori ini hukuman tidak dianggap semata-mata sebagai pembalasan atau pemulihan kerugian dan pemeliharaan ketertiban umum dalam suatu masyarakat, melainkan juga bahwa hukuman itu dijatuhkan oleh negara berdasarkan asas keadilan dan dipertahankan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Teori gabungan ini terbagi dua yaitu ada yang menitikberatkan pada pembalasan dan ada yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Yang menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Dimana ia mengatakan dasar dari tiap-tiap pidana penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Teori gabungan yang kedua, yaitu menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh berat dari yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

2. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang ada dalam skripsi ini yang berkaitan dengan judul adalah:

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dalam hidup.¹¹

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkrit.¹² Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyasikan antara nilai dan prilaku.

b. Kepolisian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

¹¹Soerjono Soekanto. Op.Cit, hlm.5.

¹²*Ibid*, hlm.3.

c. Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat dengan Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

d. Pelanggaran

Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar. Kata pelanggaran sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang yang melakukan delik itu atau subjek pelaku. Jadi pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan Undang-undang yang berlaku.

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007, Ketentraman adalah suasana batin yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun non fisik, bebas dari rasa ketakutan dan kekuatiran, sedangkan ketertiban umum adalah situasi dan kondisi yang dinamis dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai masyarakat yang memenuhi kaedah hukum, norma agama, sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Anak *punk*

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. *Punk(public united not kingdom)* yaitu negara kesatuan anti penjajah, yang artinya bebas. Anak Punk adalah suatu komunitas yang tinggal atau hidup di jalanan dengan gaya hidup yang bebas.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di provinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Payakumbuh. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹⁴

2. Sifat Penelitian

¹³Santoso, Slamet, (2010), *penerapan Psikologi Sosial*, PT.Rafika Aditama, Bandung.

¹⁴Soerjono, Abdurrahman, (2003), *metode penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁵

3. Sumber Data

Dalam penulisan proposal ini data di peroleh dari :

A. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung pada wilayah hukum Kota Payakumbuh dan juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian studi dokumentasi berupa berkas-berkas dan dokumen yang relevan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder :¹⁶

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang bertugas untuk menertibkan anak punk yang berada di Kota Payakumbuh yang diteliti.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang siap pakai yang tidak memerlukan pengolahan lagi, antara lain data atau informasi tertulis lainnya yang diperoleh selama melakukan penelitian.

B. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁵ Zainudin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

¹⁶ Soerjono soekanto, (2005), *pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta, hal.12

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian. Bahan-bahan tersebut terdiri dari :¹⁷

a. Bahan-bahan buku primer

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat berupa pengaturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Substansi Kepolisian.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Bahan-bahan Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh sarjana

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 31.

hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁸

c. Bahan-bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, ensiklopedia, dan sumber hukum lainnya.¹⁹

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penulisan nantinya dilakukan berdasarkan :

a. Studi Dokumen

Merupakan tahap awal dalam menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan meneliti dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan diamna dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam wawancara ini penulis melakukan dengan teknik “purpositive sampling” yaitu pemilihan informasi yang peneliti

¹⁸Soerjono, Abdurahman, Op.Cit, hlm 57.

¹⁹*Ibid.*

lakukan sendiri sesuai dengan permasalahan dan topik penelitian. Informan ini dianggap paling mengetahui tentang seluk beluk permasalahan.²⁰

Dengan demikian penulis melakukan wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Sosial yang berada di wilayah hukum Kota Payakumbuh. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik dilakukan setelah memperoleh data kemudian dengan cara menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui proses *editing*, yaitu pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian maka dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, dan uraian data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan sehingga bisa menjawab permasalahan.

²⁰ Burhan Ashahofa, (2004), *metode penelitian hukum*, Penerbit Rineka Citra, Jakarta, hal 91.